

Ini Kata Menlu Terkait Lagu Indonesia Raya Dibuat Parodi

JAKARTA (IM) - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi sudah mengetahui kasus penghinaan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang diduga dilakukan oleh netizen asal Malaysia, pemilik akun YouTube My Asean.

Retno menuturkan, pemerintah Indonesia sudah melaporkan kasus ini ke Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Otoritas keamanan tersebut kini sedang melakukan penelusuran. "Sudah dilakukan Kemlu dan KBRI di Kuala Lumpur," ucap Retno kepada wartawan, Minggu (27/12).

Video lagu 'Indonesia Raya' dibuat parodi beredar di media sosial. Kemenlu juga mengatakan Kepolisian Malaysia saat ini tengah menginvestigasi terkait video tersebut. "Berdasarkan laporan KBRI Kuala Lumpur, pihak Kepolisian Malaysia sedang melakukan investigasi," kata Jubir Kemlu, Teuku Fai-

zasyah, melalui pesan singkat, Minggu (27/12).

Sebagaimana diketahui, lagu kebangsaan Indonesia Raya dibuatkan parodi oleh akun Youtube MY Asean dan viral di media sosial. Aransemen serta lirik lagu Indonesia Raya diubah total dengan nada penghinaan.

Video berdurasi 1.31 menit itu telah diposting sekitar dua pekan lalu oleh akun berlogo bendera Malaysia tersebut. Saat dilihat, 33 ribu akun youtube lainnya telah menonton.

Secara singkat, lirik lagu sendiri berisi penghinaan mulai dari Indonesia bangsa sial dan mundur. Dalam lagu juga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Soekarno diparodikan.

Saat kembali dilihat, video di akun channel tersebut sudah tak bisa ditonton lagi atau menghilang. Diduga video tersebut di-take down. ● pan

KPU Beberkan Perkembangan Terbaru Terkait Perkara PPHU

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Divisi Hukum dan Pengawasan, Hasyim Asy'ari melaporkan perkembangan terbaru terkait perkara perselisihan hasil pemungutan suara (PHPU) Pilkada serentak 2020, yang telah dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hasyim menyampaikan, sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 pukul 20.30 WIB, KPU mencatat terdapat 135 permohonan PHPU Pilkada 2020 yg diajukan ke MK. Perkara PPHU tersebut meliputi 7 perkara Pilgub, 14 perkara pilwali dan 114 perkara pilbup.

"Hingga saat ini, KPU belum mengetahui pokok perkara yang jadi materi gugatan/permohonan penyelesaian perselisihan hasil pilkada, karena belum mendapatkan salinan materi gugatan," kata Hasyim dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/12).

Menindaklanjuti hal tersebut, kata dia, KPU sudah berkoordinasi dengan MK dalam rangka mengkonfirmasi kembali terhadap perkara yang diregister MK. Menurut dia, konfirmasi itu penting untuk dua hal.

Pertama, bagi perkara yang tidak diregister oleh MK berarti perkara tersebut tidak berlanjut ke pemeriksaan perkara dalam persidangan PHPU di MK.

Menurutnya, hal ini penting bagi KPU Prov/Kab/Kota yang tidak ada perkara yang diregister di MK, agar dapat melanjutkan ke tahapan pilkada berikutnya yaitu penetapan pasangan calon terpilih.

"Kedua, terhadap perkara yang diregister MK berarti akan berlanjut ke persidangan PHPU MK, dan KPU Prov/Kab/Kota yang terdapat perkara yang diregister MK harus bersiap diri menghadapi persidangan PHPU di MK," ujarnya. ● osm



DISPLAY GENDERANG SULING TARUNA-TARUNI DI KUPANG

Taruna-Taruni AAL tingkat III angkatan ke-67 menampilkan Genderang Suling di lapangan Lantamal VII Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (26/12). Genderang Suling yang biasanya ditampilkan dengan kirab keliling kota tapi karena saat pandemi maka hanya ditampilkan di depan para pejabat perwira dan tamu undangan yang menyambut kedatangan KRI Bima Suci-945.

Target 15% Suara di 2024, PKS Akan Usung Kader sebagai Capres

DEPOK (IM) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhul mengatakan, pihaknya akan tetap memegang teguh amanah musyawarah besar (mubes) terdahulu. Dalam amanah tertuang bahwa PKS menargetkan perolehan suara 15 persen di 2024. Kemudian akan mengusung kader PKS sebagai calon presiden dan wakilnya.

"Sebagaimana amanah munas kita akan pegang bahwa target 15 persen, dan dua yaitu untuk mencalonkan mengusung kader sebagai capres dan cawapres. Itu adalah amanah munas yang kita akan upayakan terlebih dahulu," kata Syaikhul usai Muswil yang digelar secara virtual, Minggu (27/12).

Kendati demikian, tak menutup kemungkinan akan berkoalisi dengan pihak lain. Namun yang utama kata Syaikhul adalah dengan mengusung kadernya sendiri. Pihaknya akan melakukan berbagai pertimbangan sebelum memutuskan koalisi.

"Ke depan kita akan berhitung dengan berbagai kader-kader, tokoh-tokoh yang memang sudah ada selama ini jadi pimpinan daerah atau jadi pimpinan nasional di masyarakat," paparnya.

Pihaknya akan melihat peluang yang mungkin bisa dijangkau. Yang pasti ungar Syaikhul, pihaknya akan tetap menjalankan amanah Munas sebagai landasan utama.

"Saya kira menjadi hal yang mungkin karena nanti kita akan lihat berbagai peluang yang ada. Tapi, amanah ini akan tetap kita pegang, kita ingin menokohkan kader terlebih dahulu untuk menjadi calon presiden dan wakil," tegasnya.

Ia menambahkan, target 15 persen itu bukanlah angka yang asal sebut.

"Kita melakukan survei dan angka muncul tidak jauh beda yaitu 14,8 persen. Jadi kita akan usaha untuk mencapai target," urainya.

PKS juga akan tetap menjadi oposisi pemerintah. Namun, oposisi yang diambil PKS tidak sembarangan. "Insya Allah PKS tetap dalam jadi oposisi. Tapi kita nggak sembarangan oposisi asal beda," kata Syaikhul.

Oposisi yang dimaksud pihaknya adalah mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. "Kalau memang program pemerintah baik dan positif yang kita dukung," ucapnya. ● osm

2 Polhukam

IDN/ANTARA



KUNJUNGAN KERJA MENTERI AGAMA DI JATENG

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (ketiga kanan) didampingi Bupati Batang Wihaji (ketiga kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat kunjungan kerja di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Sabtu (26/12). Kunjungan kerja Menteri Agama di sejumlah daerah di Jawa Tengah tersebut dalam rangka silaturahmi dengan beberapa ulama.

Menag: Ada yang Giring Agama Jadi Norma Konflik

"Agama dijadikan norma konflik itu dalam bahasa paling ekstrem siapa pun yang berbeda dengan keyakinannya, maka dia dianggap lawan atau musuh, yang namanya musuh atau lawan ya harus diperangi. Itu norma yang kemarin sempat berkembang atau istilah kerennya populisme Islam. Saya tidak ingin, kita semua tentu saja tidak ingin populisme Islam ini berkembang luas sehingga kita kewalahan menghadapinya," Menag Yaqut Cholil Qoumas.

JAKARTA (IM) - Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas mengajak semua pihak menjadikan agama menjadi inspirasi. Yaqut berbicara soal sejumlah pihak yang belakangan ini menggiring agama menjadi norma konflik.

"Saya mengajak kita semua menjadikan agama sebagai inspirasi bukan sebagai aspirasi. Itu apa artinya, paling sederhana adalah kita sekarang atau tahun-tahun belakangan ini kita

merasakan bagaimana agama itu sudah atau ada yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik," kata Yaqut dalam Silaturahmi Nasional Lintas Agama di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (27/12).

Yaqut lantas menjelaskan mengenai maksud agama digiring menuju norma konflik. "Agama dijadikan norma konflik itu dalam bahasa paling ekstrem siapa pun yang

berbeda dengan keyakinannya, maka dia dianggap lawan atau musuh, yang namanya musuh atau lawan ya harus diperangi. Itu norma yang kemarin sempat berkembang atau istilah kerennya populisme Islam. Saya tidak ingin, kita semua tentu saja tidak ingin populisme Islam ini berkembang luas sehingga kita kewalahan menghadapinya," ujar dia.

Yaqut kemudian berbicara mengenai peran semua agama di Indonesia. Menurut Yaqut, Indonesia berdiri atas kesepakatan antar seluruh elemen. "Nah yang kedua ingin saya sampaikan bahwa berkali-kali di banyak kesempatan dan saya kira ini masih sangat kontekstual meskipun posisi berbeda, dulu ketika masih aktif di Gerakan Pemuda Ansor dan Banser saya selalu katakan tidak ada Indonesia jika tidak ada Islam, tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu, dan tidak ada agama-agama lokal yang lain," ujar Yaqut.

"Indonesia itu berdiri sebagai kesepakatan antarkultur,

antarbudaya, dan agama yang ada di Indonesia, jadi barang siapa ingin menghilangkan satu sama lain atas dasar agama

maka artinya mereka tidak mengakui Indonesia, mereka tidak memiliki rasa keindonesiaan," tandasnya. ● mar

PDIP Yakin Kinerja Pemerintah Lebih Maksimal di 2021

JAKARTA (IM) - PKS mengincar suara masyarakat yang menurut hasil survei Litbang Kompas tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu tahun memimpin. PDIP meyakini kinerja pemerintah akan lebih maksimal di 2021.

"Wajar saja (PKS mengincar suara masyarakat yang belum puas dengan kinerja Jokowi), karena PKS yang berada di (luar) pemerintahan Jokowi. Setahun ini Pak Jokowi bekerja di situasi pandemi yang melanda di seluruh dunia. Tentu saja ada masyarakat yang belum puas. Tetapi, menurut saya, tidak bisa dijadikan patokan untuk perolehan suara di tahun 2024," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat kepada wartawan, Minggu (27/12).

Presiden Jokowi diketahui belum lama melakukan reshuffle kabinet. Djarot meyakini reshuffle yang dilakukan Jokowi akan lebih memaksimalkan kinerja pemerintah. "Saya yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi dan kabinet yang lebih segar pasca-reshuffle akan bekerja lebih maksimal

di tahun 2021, untuk mengatasi berbagai problem sebagai dampak dari pandemi Covid-19," sebutnya.

Djarot juga mengingatkan bahwa masyarakat yang menurut hasil Litbang Kompas belum puas dengan kinerja Jokowi selama setahun memimpin masih bisa berubah pandangan di kemudian hari. Ia menekankan hasil survei masih dinamis.

"Benar, sangat mungkin untuk berubah di tahun-tahun mendatang. Ingat, bahwa hasil survei sangat dinamis dan tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, PKS menargetkan Pemilu 2024 menjadi momentum kemenangan mereka. PKS mengincar suara masyarakat yang tidak puas dengan setahun kepemimpinan Presiden Jokowi.

Presiden PKS Ahmad Syaikhul awalnya memaparkan hasil survei Litbang Kompas. Menurut Syaikhul, berdasarkan survei Litbang Kompas sebanyak 52,5 persen responden tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi selama setahun menjabat. ● dot

Partai Berkarya Optimistis Menang Gugatan Lawan Tommy Soeharto di PTUN

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi Purwoprandjono membuka Rapat Pimpinan Nasional I (Rapimnas I) Partai Berkarya. Muchdi sempat menyinggung soal sidang gugatan PTUN yang dilayangkan Tommy Soeharto terhadap partai pimpinannya.

"Enam bulan lalu kita telah laksanakan Munaslub. Sekarang sudah 6 bulan, insyaallah awal bulan mungkin akan ada sidang PTUN, karena ada pihak lain tidak terima dengan Munaslub Partai Berkarya kemarin," kata Muchdi Dalam Rapimnas I Partai Berkarya di Sahati Hotel, Jl Taman Margasatwa, Jakarta Selatan, Minggu (27/12).

Muchdi menyatakan sikap optimis dalam menghadapi sidang gugatan di PTUN Jakarta. Dia meyakini bahwa PTUN akan mengakui kepemimpinan Partai Berkarya saat ini. "Tapi insyaallah hasil PTUN itu juga tetap mengakui keberatan kita sebagai kuasa legitimate Partai Berkarya," tegasnya.

Dalam Rapimnas kali ini pula, Muchdi menargetkan akan menyelesaikan permasalahan konsolidasi organisasi di tingkat DPP dan DPW pada April 2021 mendatang. Hal ini bertujuan untuk melancarkan tahapan verifikasi menjelang Pilkada 2024 mendatang.

"Dalam waktu terdekat masalah konsolidasi organ-

Kabinet Jokowi Jadi Panggung Capres Potensial 2024

JAKARTA (IM) - Masalahnya sejumlah pengusaha yang memiliki harta kekayaan yang melimpah atau disebut crazy rich menjadi sorotan publik paska reshuffle kabinet yang dilakukan 23 Desember kemarin. Seperti misalnya, nama Sandiaga Uno dan Muhammad Lutfi, kedua orang ini menambah daftar panjang menteri Jokowi yang berlatar pengusaha kaya.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan dalam diskusi daring Forum Jurnalis Politik (FJP) yang bertajuk "Crazy Rich Masuk Kabinet: Membaca Plutokrasi di Era Jokowi" mengatakan, masuknya nama-nama menteri yang dianggap crazy rich ini dalam kabinet juga membuka peluang mereka sebagai calon-calon presiden (capres) potensial di Pemilu 2024 mendatang.

"Ya tentu saja (membuka peluang crazy rich di kontestasi pilpres). Kenapa Sandi mau masuk kan, sejumlah nama ini kan. Pertama, secara umum masuknya crazy rich biasa,

sudah sering. Nah sejumlah nama ini mungkin akan menjadi potential contender (lawan potensial) di 2024, kepemimpinan selanjutnya," katanya, Minggu (27/12).

Menurut Djayadi, dengan mereka memperoleh posisi sebagai menteri, tentu orang yang berada di kabinet punya panggung yang lebih luas. Seperti Sandi yang memiliki panggung yang lebih luas, apalagi kalau Sandi berhasil memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), kementerian ini strategis karena berkaitan erat dengan pemulihan ekonomi, pariwisata dan ekraf.

"Pariwisata khususnya yang domestik sangat penting untuk recovery (pemulihan) ekonomi apalagi pariwisata masih sangat sulit dilakukan akibat banyaknya negara yang masih melakukan pembatasan," terangnya.

Djayadi melanjutkan, bagi para crazy rich yang memegang posisi menteri ini akan menjadi panggung yang lebih besar, mereka punya kesempatan

yang lebih luas saat di kabinet. Selain Sandi, Menteri BUMN Erick Thohir juga dikabarkan memiliki minat di 2024, karena crazy rich yang masuk di kabinet yakni, Sandi Uno, M. Lutfi, Erick Thohir, lalu juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. "Karena dalam politik, pembiayaan itu penting, mereka punya panggung biayanya memungkinkan," ujar Djayadi.

Djayadi juga menilai Presiden Joko Widodo fokus untuk memperbaiki ekonomi nasional dengan pemilihan empat dari enam menteri baru yang berlatar belakang ekonomi dan bisnis.

Selain Sandi dan M Lutfi, masih ada dua nama yang masuk dalam reshuffle kali ini, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. "Ini menyiratkan kesan bahwa memang presiden betul-betul menekankan kesan baik kepada kabinet maupun kepada publik bahwa ke depan itu fokus di bidang pemulihan ekonomi," kata Djayadi. ● han



ZIARAH PERINGATAN 16 TAHUN TSUNAMI ACEH

Warga menaburkan bunga se usai berdoa saat ziarah di kuburan masal Tsunami, Desa Ulee Lheue, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (26/12). Peringatan 16 tahun bencana gempa dan tsunami di tengah pandemi COVID-19 itu tetap berlangsung secara sederhana melalui kegiatan ziarah kubur, tausyiah dan menyantuni yatim dengan menerapkan protokol kesehatan.

PENGUMUMAN

Menindaklanjuti hasil Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MUKYUNG CONSTRUCTION INDONESIA tanggal 24-06-2020 Nomor 04 perihal pembubaran PT MUKYUNG CONSTRUCTION INDONESIA (Dalam Likuidasi) yang berkedudukan di Jakarta Barat dan dilanjutkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MUKYUNG CONSTRUCTION INDONESIA tanggal 22-12-2020 Nomor 04 perihal Laporan Pertanggungjawaban Likuidator atas Hasil Akhir Proses Likuidasi, maka dengan ini Likuidator mengumumkan bahwa :
Proses Likuidasi
PT MUKYUNG CONSTRUCTION INDONESIA telah selesai sepenuhnya dan dengan ini dinyatakan telah DIUKUIDASI
Jakarta, 28 Desember 2020
LIKUIDATOR

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT. SAMARA CITA PROMOSI, berkedudukan di Kota Bekasi ("Perseroan") melakukan pengalihan dan Penjualan saham-saham dalam Perseroan yang mengakibatkan perubahan pengendalian terhadap Perseroan.

- Sehubungan dengan hal tersebut, pihak ketiga yang berkepentingan dapat menghubungi Direksi Perseroan. Pada setiap hari kerja, Pukul 09.00 (sembilan) WIB sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) WIB Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah pengumuman di Surat Kabar - Setelah lewat jangka waktu tersebut, segala keberatan dari pihak ketiga manapun tidak dapat dilayani lagi

Bekasi, 28 Desember 2020
PT. SAMARA CITA PROMOSI,
Direksi Perseroan